

BAB III

ANALISIS KOSAKATA DAN TATA BAHASA TENTANG LGBT PADA AKUN TWITTER @GERINDRA

Roger Fowler, dkk memperkenalkan 3 (tiga) model yang menggambarkan hubungan antara objek dengan peristiwa. Pertama, model transitif yang berkaitan dengan suatu proses, maksudnya adalah mengamati bagian mana yang merupakan penyebab suatu tindakan, dan bagian mana yang merupakan hasil atau akibat dari tindakan tersebut. Kedua adalah model intransitif yang menghubungkan sebuah pihak dengan suatu proses tetapi tidak menjelaskan atau menggambarkan dampak atau objek yang menjadi sasaran. Model ketiga adalah model relasional yaitu ketika satu pihak melakukan suatu tindakan dan kemudian pihak lain adalah hasil dari tindakan tersebut dan menjelaskan hubungan di antara dua entitas/bagian tersebut.

Secara keseluruhan pernyataan dalam *tweet* Partai Gerindra yang disampaikan pada tanggal 29 November 2019 pada akun resmi @Gerindra berjumlah 52 *tweet*. *Tweet* tersebut terdiri dari pernyataan mereka sendiri, juga tanggapan kepada orang atau pengguna Twitter lain yang menanggapi pernyataan @Gerindra. Pernyataan Partai Gerindra sendiri terdiri dari 11 *tweet*, sedangkan pengguna Twitter yang menanggapi ada 32 orang, dan pernyataan Partai Gerindra yang menanggapi orang-orang tersebut adalah 41 *tweet*.

Untuk menunjukkan adanya keterkaitan antar *tweet* yang menjadi bahan penelitian ini hingga dapat membentuk sebuah wacana, juga untuk melihat makna dari *tweet* secara keseluruhan, maka peneliti akan menganalisis secara lebih mendalam. Dalam analisis wacana kritis model Roger Fowler dkk., terdapat dua hal elemen penting yang perlu diamati, yakni: aspek kosakata dan aspek tata bahasa. Pada bab ini penulis akan membahas mengenai aspek kosakata yang terdiri dari, kosakata: membuat klasifikasi, kosakata: membatasi pandangan, kosakata: pertarungan wacana, dan kosakata: marjinalisasi, sekaligus aspek tata bahasa yang terdiri dari, efek kalimat pasif: penghilangan pelaku, dan efek nominalisasi: penghilangan pelaku.

3.1 Kosakata: Membuat Klasifikasi

Klasifikasi atau pengelompokan terjadi sebagai penyederhanaan dan abstraksi dari realitas yang begitu kompleks, agar dapat dikenali dan dibedakan dengan yang lain (Eriyanto, 2011:135).

Kosakata membuat klasifikasi yang diambil dari Twitter @Gerindra dibedakan menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Positif berarti kosakata tersebut cenderung membela atau tidak mengecilkan kelompok LGBT, sedangkan negatif berarti kosakata tersebut tidak berpihak, memojokkan, dan cenderung merugikan kelompok LGBT. Berikut adalah kosakata-kosakata positif yang digunakan:

3.1.1 Wacana Hukum dan Politik

Penggunaan wacana hukum dan politik dalam analisis kosakata membuat klasifikasi dikarenakan fakta bahwa Partai Gerindra merupakan salah satu partai politik yang cukup berpengaruh di Indonesia. Partai Gerindra mengangkat topik LGBT dengan menggunakan dasar hukum negara sebagai bukti yang mendukung pendapat mereka, dengan menggunakan kosakata klasifikasi, pengelompokan, atau penyederhanaan, yang berhubungan dengan hukum dan politik. Oleh karena itu, penulis menggunakan wacana hukum dan politik sebagai instrumen penelitian berikut.

a. Positif

Secara hukum nasional, kelompok LGBT tidak mendapatkan dukungan dan perlindungan khusus dari negara, tetapi juga bukan merupakan tindak pidana. Pernikahan dan adopsi oleh orang-orang dari kelompok LGBT tidak diperbolehkan. Pemerintah tidak membuat undang-undang anti-diskriminasi untuk orang-orang dari kelompok LGBT yang menegaskan kaitannya dengan orientasi seksual atau identitas gender karena hukum di Indonesia hanya mengakui keberadaan gender dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan saja yang secara tegas diatur dalam Undang-undang Perkawinan (UU No. 1/1974) dan Undang-undang Administrasi Kependudukan (UU No. 23/2006). Sehingga orang-orang yang tidak merasa dalam spektrum tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan merasa kesusahan untuk mengekspresikan dirinya.

Kosakata membuat klasifikasi yang diambil dari Twitter @Gerindra dibedakan menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Positif berarti kosakata tersebut cenderung membela atau tidak mengecilkan kelompok LGBT, sedangkan negatif berarti kosakata tersebut tidak berpihak, memojokkan, dan cenderung merugikan kelompok LGBT. Berikut adalah kosakata-kosakata positif yang digunakan:

Dalam tweet-nya, Partai Gerindra banyak sekali menggunakan kosakata “**hak**” seperti dalam tweet-nya “Kaum LGBT tetap berhak mendapatkan semua haknya sebagai warga negara,...”

untuk menjelaskan bahwa kelompok LGBT memiliki hak yang tidak sepatutnya dihilangkan. Partai Gerindra menjelaskan secara singkat maupun secara faktual dengan mengutip salah satu regulasi yaitu Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 tentang hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dengan maksud menjelaskan kepada pembaca dan masyarakat luas bahwa diskriminasi tersebut adalah hal yang sudah melanggar UUD 1945 sebagai hukum dasar atau konstitusi tertulis yang bersifat mengikat. Selain itu, kosakata “**semua warga negara**” juga sering digunakan untuk menegaskan bahwa orang-orang dari kelompok LGBT tetap menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dengan hak dan kewajiban yang sama.

Kosakata “**bertentangan**” juga disebutkan Partai Gerindra untuk menjelaskan pada pembaca bahwa penolakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tidak sesuai dengan ideologi negara, Pancasila, yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab melalui tweet-nya “Penolakan yang dilakukan terhadap kaum LGBT sebagai CPNS oleh @KejaksaanRI sangat tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai Pancasila...”. Pelanggaran pada sila pertama menunjukkan bahwa agama apapun di Indonesia tidak ada yang mengajarkan sikap membedakan setiap makhluk hidup ciptaan Tuhan. Setiap agama mengajarkan untuk saling menghargai dan mengasihi. Terkait dengan pelanggaran pada sila ke-2, tindakan diskriminatif adalah perbuatan yang tidak adil dan tidak beradab. Manusia beradab adalah manusia yang memperlakukan sesama manusia secara setara dan tidak membedakan atas dasar apapun, baik suku, agama, ras, maupun golongan.

Namun bukan hanya ke dua sila tersebut, diskriminasi terhadap suatu kelompok juga merupakan pelanggaran pada sila lainnya. Sila ke-3 mengajak masyarakat untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, serta memunculkan rasa cinta terhadap negara dengan menjaga kerukunan atas semua perbedaan dan menghargai perbedaan atau keragaman tersebut dengan sepenuh hati. Jika diskriminasi masih terus terjadi, maka Indonesia belum dapat dikatakan sebagai negara yang menjunjung tinggi asas persatuan dan toleransi karena masih banyaknya orang-orang atau kelompok yang bersikap diskriminatif hingga dapat memecahbelah persatuan Indonesia. Pada sila ke-5 yang berisi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, jelas tidak adil bagi orang-orang dari kelompok LGBT, apalagi bila melihat konteksnya yang merupakan diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan.

Partai Gerindra kemudian dengan tegas mengatakan lewat kosakata “**seharusnya**” kepada Kejaksaan Agung dalam tweet-nya “@KejaksaanRI sebagai salah satu lembaga hukum seharusnya sangat memahami dasar hukum terhadap masalah penolakan LGBT menjadi CPNS ini”, bagaimana mereka sebagai salah satu instansi atau lembaga hukum yang memiliki pengetahuan dan dasar hukum lebih banyak, berhubungan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia, tetapi justru melakukan tindakan yang menyudutkan orang-orang dari kelompok LGBT dengan diskriminasi hak. Hak yang sudah tercantum di UUD 1945 untuk semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali ini tidak seharusnya diganggu gugat oleh siapa pun. Tindakan Kejaksaan Agung yang dengan jelas mendiskriminasi kelompok tersebut membuat masyarakat merasa “wajar” dengan tindakan diskriminasi. Hal tersebut yang dapat menjadikan diskriminasi terhadap kelompok marjinal, dalam hal ini kelompok LGBT, menjadi semakin langgeng dan ternormalisasi.

Secara implisit, tujuan Partai Gerindra menyuarakan topik persoalan diskriminasi LGBT adalah agar pemerintah Indonesia membuatkan “**payung hukum**” yang mengatur kelompok LGBT dengan jelas. Maksud dari payung hukum adalah dasar hukum dari tindakan dan aturan yang berencana untuk dikeluarkan. Pada akhirnya, pelaku diskriminasi berlindung pada pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Pencabulan kepada orang di bawah umur merupakan tindakan pedofilia yang adalah tindakan kriminal karena anak di bawah umur belum bisa memberikan *consent* yang seharusnya didapatkan ketika melakukan hubungan. Sedangkan tindakan pedofilia bukan termasuk dalam LGBT+, karena LGBT+ merupakan orientasi seksual, identitas gender, ekspresi, dan karakteristik seksual.

Menggunakan kuasanya sebagai salah satu partai politik yang mempunyai peran dalam pemerintahan, Partai Gerindra dengan berani dan percaya diri “**menolak**” keputusan Kejaksaan Agung tentang penolakannya terhadap pekerja yang mempunyai orientasi seksual LGBT. Bukan hanya itu, karena tidak ingin dianggap hanya membantu kelompok yang dipandang sebelah mata di Indonesia ini, Partai Gerindra juga menyampaikan bahwa mereka pernah menyuarakan untuk menolak diskriminasi terorisme terhadap kelompok orang yang bercadar dan mengenakan celana

cingkrang. Hal itu dilakukan Partai Gerindra agar pembaca percaya bahwa mereka tidak hanya mendukung kelompok LGBT tetapi juga kelompok lainnya yang terdampak diskriminasi.

Klasifikasi yang dibuat oleh Partai Gerindra dalam setiap tweet pernyataannya di atas memiliki wacana hukum dan kenegaraan, yang artinya adalah bahwa Partai Gerindra menyuarakan ketidakadilan atau diskriminasi yang dialami oleh kelompok LGBT berdasarkan dengan fakta dan regulasi tertulis dalam dasar hukum negara Indonesia mengenai hak setiap warga negara. Realitas yang kompleks berupa sumber bacaan yang banyak mengenai hukum atau peraturan, dikelompokkan dan disederhanakan oleh Partai Gerindra melalui kosakata-kosakata yang digunakan dalam pernyataan-pernyataannya. Hal itu bertujuan agar pembaca lebih cepat mengerti dan paham tentang persoalan yang sedang dibicarakan.

b. Negatif

Dewan Hak Asasi Manusia PBB (dalam Santoso, 2016:221) pada tahun 2011 kemarin sempat menerbitkan resolusi pertama mengenai pengakuan atas hak-hak LGBT serta mendesak semua negara untuk melindungi hak-hak LGBT menggunakan dasar hukum. PBB menggunakan perspektif *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) sebagai dasar aturan mereka untuk mengesahkan resolusi persamaan hak yang menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan memiliki derajat yang sama, serta setiap orang sudah seharusnya memperoleh hak dan kebebasannya tanpa diskriminasi apapun.

Kosakata “**kewajiban**” yang digunakan oleh Partai Gerindra di sini memiliki konteks yang negatif dan cenderung menyudutkan kelompok LGBT. Kewajiban yang dimaksud oleh Partai Gerindra dalam kosakata tersebut adalah bahwa menurut mereka orang-orang dari kelompok LGBT seharusnya memiliki kewajiban yang lebih banyak dan lebih besar dari masyarakat Indonesia lainnya. Padahal dalam UUD 1945, sudah diatur bahwa setiap masyarakat Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak lebih dan tidak kurang.

Kosakata “**aturan**” dalam konteks ini adalah Partai Gerindra menyebutkan tidak adanya aturan tertulis khusus untuk kelompok LGBT dalam tweet-nya “Karena tidak ada aturan tertulis yang menyatakan LGBT dilarang mendapatkan pekerjaan...”, dengan maksud bahwa agar kelompok tersebut mempunyai aturan yang tidak melarang mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi dengan beranggapan seperti itu, sama saja Partai Gerindra tidak menganggap

orang-orang dari kelompok LGBT sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Hal ini kontradiktif dengan pernyataan mereka yang menyatakan di awal bahwa kelompok LGBT merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan harus dihargai haknya.

Partai Gerindra memiliki maksud yang baik ketika mengatakan bahwa pemerintah harus membuatkan payung hukum atau dasar hukum khusus untuk kelompok LGBT. Tetapi pada kosakata “**menjustifikasi**” yang merupakan lanjutan dari permintaannya akan payung hukum, terlihat bahwa niat Partai Gerindra meminta dibuatkan dasar hukum adalah justru untuk melindungi orang-orang yang mendiskriminasi kelompok LGBT, bukan untuk melindungi kelompok marjinal tersebut. Dengan kosakata tersebut, Partai Gerindra ingin dapat membedakan orang-orang dari kelompok LGBT dari masyarakat pada umumnya, melalui penampilan fisik. Padahal tidak semua orang-orang dengan orientasi dan identitas LGBT menunjukkan atau mengekspresikannya melalui penampilan. Hal ini dapat berbahaya karena semakin melanggengkan diskriminasi yang sudah lama dialami oleh kelompok LGBT.

Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara, dan Undang-undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar, digunakan secara kontradiktif untuk melawan pernyataan Partai Gerindra sendiri. Kedua pondasi negara tersebut terkesan ingin dimanfaatkan oleh Partai Gerindra secara salah dengan penuntutan pembuatan peraturan untuk semakin melanggengkan diskriminasi terhadap kelompok LGBT. Tidak ada keadilan yang terlihat dari situ, bahkan Partai Gerindra secara implisit menganggap bahwa kelompok LGBT tidak seharusnya ada di Indonesia.

3.1.2 Wacana Agama

Penulis memilih agama sebagai salah satu instrumen penelitian untuk analisis kosakata membuat klasifikasi adalah karena terdapat banyaknya wacana yang menyebutkan bahasan tentang agama, terutama agama Islam. Penyederhanaan kalimat menggunakan kosakata-kosakata yang berhubungan dengan agama ini terjadi karena agama masih memegang peran terkuat di Indonesia. Selain itu juga karena Partai Gerindra memiliki hubungan erat dengan organisasi-organisasi Islam di Indonesia.

a. Positif

Agama merupakan topik pembahasan yang masih sangat banyak dibicarakan karena agama dijadikan pegangan yang dapat memengaruhi pola pikir dan tingkah laku manusia. Agama juga

menjadi sebuah perilaku kehidupan sehari-hari yang sangat menarik untuk diteliti karena kuasa dan perannya yang sangat besar dan berpengaruh tersebut.

Kosakata “**diskriminatif**” yang dimaksud oleh Partai Gerindra dalam wacananya adalah bahwa agama apapun tidak pernah mengajarkan untuk membeda-bedakan semua makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga mereka beranggapan bahwa manusia yang beragama tidak mungkin bersikap diskriminatif. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Partai Gerindra menganggap orang-orang yang masih bersikap diskriminatif terhadap sesama manusia merupakan orang-orang yang tidak beragama atau tidak mengerti banyak tentang agama. Kosakata tersebut seringkali digunakan Partai Gerindra dalam konteks ini untuk mengajarkan bahwa sikap tersebut bukan lah sikap yang diperbolehkan oleh agama manapun.

Partai Gerindra mencoba menyederhanakan kepada pembaca dengan mengklasifikasikan kisah agama dari Nabi Muhammad sebagai contoh, dengan tujuan agar pembaca menjadi yakin dan percaya hingga kemudian menirukan apa yang ada dalam kisah tersebut. Dengan menggunakan kosakata “**menyelamatkan seekor anjing**”, Partai Gerindra bermaksud agar pembaca paham bahwa sesama manusia atau bahkan sesama makhluk hidup, kita harus saling menolong, membantu, dan menyelamatkan satu sama lain karena semuanya adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada ajaran agama yang mengarahkan untuk berperilaku berbeda terhadap satu sama lain. Bahkan Nabi Muhammad yang merupakan seorang nabi pun memiliki kepedulian yang sama tidak memandang latar belakang atau siapa makhluk tersebut. Begitu juga dengan kosakata “**mengganggu**” yang masih merupakan kelanjutan dari kisah Nabi Muhammad yang menolong seekor anjing yang sedang menyusui dan memerintahkan sahabatnya untuk ikut membantu melindungi anjing tersebut, seperti dalam tweet-nya “Seketika beliau memerintahkan sahabatnya untuk berdiri di dekat anjing tersebut agar para tentara tidak mengganggu anjing yang sedang menyusui itu”. Selanjutnya adalah kosakata “**kasih sayang Nabi Muhammad**” kepada seekor anjing yang sedang menyusui tersebut. Dalam kisah tersebut seekor anjing yang sedang menyusui itu sedang diganggu oleh para tentara, oleh karena itu sahabatnya diminta untuk ikut melindunginya. “**Akhlaq mulia**” Nabi Muhammad terhadap seekor anjing ini diharapkan Partai Gerindra dapat ditiru dan diamalkan oleh pembaca.

Partai Gerindra menggunakan penekanan kepada pembaca agar semakin percaya bahwa semua agama mengajarkan untuk “**mengasihi dan menghormati sesama manusia**”. Agama apapun tidak ada yang mengajarkan untuk saling membedakan apalagi sampai membenci dan

melakukan tindakan yang membahayakan seperti mempersekusi sesama manusia, khususnya kelompok minoritas.

Kekuasaan merupakan sebuah konsep sangat berkaitan dengan agama, bahkan terkadang keduanya melebur menjadi satu kesatuan. Hal ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Partai Gerindra bahwa mereka menggunakan agama sebagai salah satu cara agar masyarakat tunduk, karena kuasa agama di Indonesia sangat lah kuat. Agama dijadikan pondasi dan acuan dalam segala hal, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Negatif

Agama sebagai pengetahuan mempunyai kekuasaan yang sangat besar, bahkan lebih besar dari negara. Agama memunculkan suatu tatanan masyarakat yang sesuai dengan pengertian masyarakat tersebut mengenai agama. Masyarakat Islam memproduksi kekuasaan berupa pengetahuan agama dalam bentuk bentuk resistensi atas dominasi preventif perihal wacana keagamaan (Priyanto, 2017:199).

Melalui kosakata “**tidak menghalalkan dan membenarkan perilaku LGBT**”, Partai Gerindra seakan menunjukkan kuasanya bahwa mereka memiliki hak untuk membenarkan/menyalahkan atau menghalalkan/mengharamkan suatu perilaku, individu, atau kelompok tertentu. Karena di dalam agama, hanya Tuhan/Allah yang berhak menghakimi suatu hal atau bahkan makhluk dengan pernyataan seperti itu. Kosakata “haram” sudah termasuk kosakata yang kasar dan penuh kebencian. Hal ini dapat dijadikan salah satu bahan oleh masyarakat untuk semakin meminggirkan dan membenci kelompok LGBT. Penyederhanaan yang dilakukan oleh Partai Gerindra sudah sangat membahayakan kehidupan kelompok tersebut.

Sedangkan kosakata “**penyuluhan agama**”, menunjukkan bahwa Partai Gerindra menganggap LGBT adalah sesuatu yang dapat dicegah dan diatasi dengan agama. Kosakata tersebut pun membuktikan bahwa Partai Gerindra mengkategorikan kelompok LGBT sebagai orang-orang yang tidak beragama atau tidak mengerti tentang agama. Dengan begitu Partai Gerindra telah melakukan generalisasi dan penghakiman tanpa dasar apapun kepada semua kelompok LGBT.

Pada kosakata selanjutnya yaitu “**LGBT haram dan laknat**”, menunjukkan Partai Gerindra yang seakan mempunyai wewenang untuk menghakimi sesama manusia dengan sebutan “haram”

dan “laknat”. Seorang akademisi Muslim, Lailatul Fitriyah¹ mengatakan bahwa tidak ada pembahasan sistematis mengenai isu LGBT apabila dilihat dari sisi teologi Islam. Laily mengungkapkan bahwa “ajaran Islam” dalam artian fiqh (yurisprudensi Islam) hanya membahas tindakan, bukan orientasi seksual. Maka dari itu fiqh membuka banyak ruang terhadap eksistensi LGBT. Artinya adalah bahwa yang dilarang dalam fiqh tersebut adalah praktik “liwat” (hubungan seksual anal atau sodomi), bukan perasaan atau ekspresi homoseksualitasnya.

Hipotesis Anshori² mengenai jejak *queer* dalam Al-Quran dan Hadis adalah bahwa sebagaimana dengan lawan jenis, seksualitas sesama jenis merupakan hal yang natural. Tetapi kemarahan Allah timbul ketika ekspresi seksual seseorang merupakan paksaan – pemerkosaan – terhadap anak di bawah umur, seperti yang dilakukan kaum Nabi Luth.

Di Indonesia sendiri, dinamika seksualitas dan gender cenderung lebih mudah diterima ketika sebelum masa penjajahan dimulai. Bahkan ketika agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13, hal-hal tradisional yang memiliki nuansa LGBT, seperti Reog Ponorogo, maupun 5 (lima) macam gender di Bugis, masih bertahan jauh hingga sesudah Islam datang, menunjukkan bahwa diskriminasi dan persekusi terhadap kelompok LGBT adalah hal modern dalam sejarah Islam di Indonesia.

3.1.3 Wacana Sosial

Maksud dari penggunaan wacana sosial sebagai salah satu instrumen dalam analisis kosakata membuat klasifikasi adalah karena hubungannya dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Partai Gerindra membuka diskusi di ruang publik yang memungkinkan masyarakat luas untuk berpartisipasi. Maka, penyederhanaan kosakata yang berhubungan dengan kehidupan sosial bermasyarakat dipilih untuk dijadikan instrumen analisis berikut.

a. Positif

Representasi ideologi dalam wacana sosial, dalam hal ini khususnya dalam wacana konflik sosial-politik adalah bagian dari kajian analisis wacana kritis. Wacana sosial didasarkan pada realitas yang terjadi di masyarakat, tentang yang dialami sehari-hari maupun konstruksi ideologi yang ada.

¹ Ayunda Nurvitasari, *Al-Qur'an Tak Ajarkan Membenci Kelompok LGBT: Akademisi Muslim*, diakses dari <https://magdalene.co/story/alquran-tak-ajarkan-membenci-kelompok-lgbt-akademisi-muslim>, pada tanggal 3 Juni 2021, pukul 18.28 WIB.

² Aan Anshori, *Jejak 'Queer' dalam Al-Qur'an dan Hadis*, diakses dari <https://magdalene.co/story/jejak-queer-dalam-alquran-dan-hadis>, pada 3 Juni 2021, pukul 18.43 WIB.

Partai Gerindra mengawali diskusi atau pernyataannya dalam tweet-nya dengan mengatakan bahwa mereka “**tidak setuju dengan keputusan Kejaksaan Agung**”. Kosakata “tidak setuju” dijadikan wacana sosial karena Partai Gerindra mewakili kelompok LGBT yang terdiskriminasi, mencoba untuk bersuara mengenai ketidakadilan terhadap kelompok tersebut. Hal tersebut dilakukan Partai Gerindra dengan menyederhanakan kepada pembaca bahwa kelompok LGBT merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang juga memiliki hak untuk “**menyuarakan hak kelompok marjinal**” atas ketidakadilan yang mereka alami. Partai Gerindra memiliki harapan dapat “**menyelesaikan suatu masalah**” yaitu “**polemik LGBT**” dalam tweet-nya “... Jika ada kerjasama yang baik dari semua pihak, polemic LGBT ini bisa kita selesaikan”, dengan membawa topik tersebut ke ruang umum menggunakan media sosial. Secara tersirat dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan, Partai Gerindra bermaksud untuk menormalisasi topik bahasan mengenai LGBT kepada pembaca.

Pada kosakata “**konteks pembahasan**” dalam tweet “Kami tidak mendukung LGBT, tapi disini saudara harus memahami konteksnya...”, Partai Gerindra terus menerus menegaskan dengan penyederhanaan bahwa konteks mereka mendukung kelompok LGBT adalah membantu mereka untuk memperoleh hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Di luar konteks pembahasan itu, Partai Gerindra mengakui bahwa mereka tidak ingin diasosiasikan dengan kelompok tersebut. Meskipun begitu Partai Gerindra terus mencoba untuk meyakinkan dengan mengedukasi masyarakat untuk “**belajar PPDGJ**” atau Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa agar tidak ada lagi masyarakat yang mengatakan bahwa LGBT adalah penyakit atau gangguan kejiwaan. Partai Gerindra mencoba menginformasikan menggunakan bukti yang faktual karena merupakan hasil penelitian para ahli yang bersangkutan.

Dengan menggunakan kosakata “**jangan takut mengomentari**”, Partai Gerindra mencoba untuk terbuka akan semua kritik dan saran dari masyarakat luas. Mereka merasa bahwa telah melakukan hal yang benar dengan membantu menyuarakan hak kelompok marjinal dan tetap teguh dengan pendiriannya, oleh karena itu Partai Gerindra tidak takut dengan orang-orang yang mengkritik mereka. Mereka tetap mencoba untuk “**menghargai hak masyarakat**” dengan tetap membiarkan mereka bersuara meskipun tidak sejalan dan sepaham dengan Partai Gerindra. Bahkan Partai Gerindra mencoba untuk tetap membalas kritik-kritik tersebut dengan baik dan tetap terus menegaskan konteks pembahasan yang mereka maksud. Namun meskipun begitu,

Partai Gerindra juga mengapresiasi pembaca yang “**memahami poin yang dimaksud**” dengan ucapan-ucapan terima kasih. Tujuan Partai Gerindra dengan mengapresiasi tanggapan pembaca tersebut adalah untuk mengklasifikasikan yang mana tanggapan positif dan yang mana tanggapan yang negatif atas pernyataannya.

Pada bidang sosiologi, wacana menekankan khususnya dalam kaitan konteks sosial dari pemakaian bahasa. Realitas dunia digambarkan melalui kosakata sebagai sistem klasifikasi, memungkinkan seseorang untuk dapat mengontrol dan mengatur pengalaman pada realitas sosial. Meskipun begitu, terdapat banyak sistem klasifikasi yang berbeda-beda bergantung pada satu kelompok dengan kelompok lainnya.

b. Negatif

Isu LGBT ini terus menerus memengaruhi wacana sosial dalam bermasyarakat karena isu ini menyangkut isu antar golongan dan memengaruhi masyarakat yang ada di dalamnya.

Partai Gerindra dengan tegas mengatakan bahwa kelompok LGBT “**tidak mempunyai hak untuk mengekspos dan mengembangkan perilaku LGBT**” menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka tidak mengakui adanya kelompok tersebut di Indonesia. Hal ini semakin dikuatkan dengan pernyataannya bahwa mereka “**menolak perilaku LGBT**”. Kemudian dengan mengatakan bahwa Partai Gerindra juga “**tidak mendukung perilaku LGBT**” selain menunjukkan sikap kontradiksi terhadap dukungannya dalam mendapatkan hak, juga menunjukkan kontradiksi dengan pengetahuannya mengenai orientasi seksual. Pada Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III poin F66 terdapat catatan bahwa “orientasi seksual sendiri jangan dianggap sebagai gangguan”. Partai Gerindra meskipun mengetahui dan menginformasikan tentang hal itu, tetapi tetap menulisnya sebagai “**disorientasi seksual**” dalam tweet “...pada point F66 menyebutkan bahwa disorientasi seksual bukan gangguan jiwa”, padahal disorientasi dalam ilmu kedokteran memiliki arti “kehilangan daya untuk mengenal lingkungan” atau lebih singkatnya “kebingungan”. Sedangkan “orientasi” sendiri memiliki arti singkat “kecenderungan”. Di buku PPDGJ poin F66 pun yang tertulis adalah “orientasi seksual”, bukan “disorientasi”. Dua hal tersebut berbeda dan berlawanan yang membuat Partai Gerindra terkesan hanya mengerti sebagian atau menolak untuk memahaminya.

Apabila Partai Gerindra memahami secara keseluruhan mengenai PPDGJ III atau apa itu orientasi seksual, seharusnya mereka juga paham bahwa orientasi seksual tidak dapat dicegah, disembuhkan, atau diubah. Namun kosakata “**mencegah/pencegahan LGBT sejak dini**”

menunjukkan ketidaktahuan Partai Gerindra, atau mereka yang menolak memahami secara lengkap. Partai Gerindra tetap bersikukuh bahwa LGBT adalah perilaku yang dapat diatasi. Padahal perilaku seksual dengan orientasi adalah hal yang berbeda. Apabila Partai Gerindra membicarakan tentang perilaku seksualnya, maka banyak juga orang-orang heteroseksual yang melakukan kegiatan seksual di luar tali pernikahan, dan pasti banyak juga orang-orang homoseksual yang tidak melakukan kegiatan seksual dalam hubungannya.

Pernyataannya menggunakan kosakata “**normal**” dengan konteks bahwa yang dimaksud dengan normal adalah orang-orang heteroseksual, menunjukkan kalau mereka secara tidak langsung menganggap orang-orang dari kelompok LGBT adalah tidak normal atau abnormal dan arena itu secara tidak langsung menganggap bahwa mereka mempunyai kelainan. Selain menganggap kelompok LGBT tidak normal, dengan menggunakan pengandaian kisah Nabi Muhammad menunjukkan bahwa Partai Gerindra mengandaikan kelompok LGBT seperti “**binatang/hewan**” dalam salah satu tweet-nya “... Kasih sayang Nabi Muhammad kepada binatang saja tidak diskriminatif...”, dan lebih tepatnya adalah “**anjing**” seperti dalam tweet “... Nabi Muhammad pernah ‘menyelamatkan’ seekor anjing yang sedang menyusui anak-anaknya”. Padahal jika dicari dan ditelusuri, sangat banyak contoh-contoh cerita Nabi Muhammad yang mencurahkan kasih sayangnya kepada umatnya, atau bahkan kepada orang-orang yang membencinya. Memberi pengandaian sebagai binatang/hewan anjing merupakan sikap yang merendahkan dan tidak menghargai sesama manusia. Dengan menganggap bahwa topik yang mereka bicarakan “**bukan tentang berkembang biak**” melainkan tentang hak mereka sebagai warga negara Indonesia, Partai Gerindra secara tidak langsung juga menyamakan kelompok LGBT dengan hewan atau tumbuhan karena kosakata tersebut memiliki arti “bertambah banyak (tentang tanaman, ternak piaraan, dan sebagainya) (KBBI Daring, 2016).

Partai Gerindra juga berpendapat bahwa LGBT “**bertentangan dengan norma**”, dengan konteks norma apapun. Salah satunya adalah norma sosial. Dalam perspektif sosiologi, norma adalah ‘aturan’ yang diharapkan diikuti oleh masyarakat (Ruman, 2009:109). Norma pada umumnya tidak diungkapkan secara terang-terangan dan tertulis seperti dalam undang-undang, melainkan pada umumnya diteruskan melalui proses sosialisasi dari satu orang ke orang lainnya tentang bagaimana seseorang harus berperilaku secara wajar. Pada dasarnya, kebutuhan masyarakat terhadap keteraturan dan ketertiban sosial adalah alasan mengapa norma sosial terbentuk. Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial hanyalah konstruksi sosial yang dibuat oleh

masyarakat demi terciptanya kehidupan yang damai menurut mereka. Sayangnya konstruksi sosial ini merugikan kelompok-kelompok marjinal karena dianggap tidak wajar, salah satunya adalah kelompok LGBT. “**Bahaya LGBT**” merupakan salah satu konstruksi sosial yang menyudutkan dan beresiko bagi kelompok tersebut. Padahal bahaya adalah hal-hal yang memiliki potensi untuk mengakibatkan kecelakaan dan yang mengancam keselamatan, seperti bencana. Sedangkan LGBT hanyalah sebuah orientasi seksual yang dimiliki oleh semua orang.

Selain itu kosakata Partai Gerindra yang menganggap bahwa LGBT “**buruk bagi kesehatan**” juga sangat menyudutkan kelompok tersebut. Apabila yang dimaksud Partai Gerindra adalah HIV/AIDS, pernyataan tersebut salah besar. Karena menurut Profesor Zubairi Djoerban (dikutip dari <https://twitter.com/ProfesorZubairi/status/1400268633809383425> pada 3 Juni 2021 pukul 22.41 WIB), seorang dokter spesialis penyakit dalam subspecialisasi hematologi onkologi medik, mengatakan dalam akun twitter pribadinya, bahwa faktor penularan HIV di Indonesia ditempati oleh heteroseksual pada posisi pertama dengan 67,8%. Disusul dengan pengguna narkoba suntik sebanyak 10,5%, dan sisanya adalah homoseksual, biseksual, perinatal, transfusi, dan lainnya yang tak teridentifikasi.

Kosakata selanjutnya yang disampaikan Partai Gerindra adalah mereka mengeklaim bahwa pernyataannya tentang kelompok LGBT “**dipelintir oknum**”. Maksudnya di sini adalah bahwa niatnya untuk membantu kelompok LGBT dengan menyuarakan haknya, dianggap oleh beberapa orang sebagai dukungan menyeluruh terhadap kelompok tersebut. Partai Gerindra seakan menjadikan dirinya sebagai korban dengan menganggap orang yang tidak setuju dengannya sebagai “oknum”.

Subjek sosial dan hubungan sosial berkaitan dengan kekuasaan dan peran yang dimainkan praktik-praktik kewacanaan untuk meneruskan kepentingan kelompok-kelompok sosial khusus (Sekarwangi, 2016:52). Praktik Partai Gerindra dalam menyederhanakan pernyataan menggunakan kosakata-kosakata klasifikasi merupakan bentuk di mana mereka mencoba untuk menguasai masyarakat dengan tidak berbicara secara utuh. Tujuan klasifikasi ini hanyalah agar masyarakat cepat paham dengan maksud Partai Gerindra, tetapi justru dibingungkan dengan kosakata-kosakata kontradiktifnya.

3.2 Kosakata: Membatasi Pandangan

Menurut Fowler dkk., pada dasarnya bahasa bersifat membatasi—kita diajak berpikir untuk mengerti realitas adalah seperti itu, bukan yang lain (Eriyanto, 2011:137). Kosakata membatasi pandangan yang diambil dari Twitter @Gerindra dibedakan menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Positif berarti kosakata tersebut cenderung membela atau tidak mengecilkan kelompok LGBT, sedangkan negatif berarti kosakata tersebut tidak berpihak dan cenderung merugikan kelompok LGBT.

Kosakata membatasi pandangan yang positif berarti bahwa Partai Gerindra memberi pandangan-pandangan positif tentang LGBT dan orang-orangnya kepada pembaca atau masyarakat luas. Sedangkan kosakata membatasi pandangan yang negatif memiliki arti bahwa Partai Gerindra membatasi pandangan pembaca atau masyarakat luas mengenai LGBT dan kelompoknya dengan mengajak mereka berpikir hal-hal buruk yang bisa saja salah.

3.2.1 Wacana Hukum dan Politik

Pada analisis kosakata membatasi pandangan, wacana hukum dan politik digunakan Partai Gerindra untuk mengarahkan pandangan pembaca pada ideologi dan wacana yang disampaikan oleh Partai Gerindra, bahwa wacana yang ingin mereka sampaikan adalah mendukung kelompok LGBT untuk mendapatkan hak pekerjaan dan penghidupan yang layak.

a. Positif

Partai Gerindra seraya terus memberi pandangan kepada pembaca bahwa kelompok LGBT yang mereka bela “**memiliki hak yang sama seperti semua warga negara Indonesia**”. Walaupun bahasa bersifat membatasi, tapi dalam hal ini sifatnya positif karena mencoba membatasi pandangan agar pembaca ikut berpikir demikian. Mereka juga mencoba menginformasikan kepada pembaca bahwa yang dilakukan Kejaksaan Agung “**bertentangan dengan nilai Pancasila**”. Tujuannya adalah untuk membatasi pandangan pembaca bahwa perbuatan diskriminatif tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan pada sila-sila dalam Pancasila. Partai Gerindra terus mengkritik Kejaksaan Agung di hadapan masyarakat luas dengan mengatakan bahwa “**seharusnya Kejaksaan Agung memahami dasar hukum negara**”. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi pandangan pembaca dan pihak Kejaksaan Agung sendiri bahwa sebagai lembaga hukum, sangat mengecewakan dengan apa yang mereka lakukan terhadap kelompok minoritas. Dasar hukum negara yang seharusnya diamalkan, alih-alih dilanggar

dengan pernyataannya yang menyudutkan dan cenderung menggiring opini masyarakat untuk semakin meminggirkan kelompok LGBT. Melakukan diskriminasi terhadap warga negara berarti sudah **“melanggar nilai-nilai konstitusi negara”**. Partai Gerindra dengan ini juga mencoba menyampaikan kepada pembaca bahwa apabila sesama warga negara Indonesia melakukan diskriminasi, apalagi karena orientasi seksual, hal tersebut adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai konstitusi negara dan dasar hukum negara.

Partai Gerindra **“meminta pemerintah untuk membuat hukum yang jelas”** untuk kelompok LGBT dengan harapan bahwa mereka membuatnya untuk melindungi kelompok tersebut dari orang-orang yang anti terhadap kelompok LGBT. Tetapi di sini pun sudah menunjukkan bahwa Partai Gerindra memberi pandangan kepada pembaca bahwa seharusnya dalam dasar hukum negara terdapat hukum yang jelas secara khusus mengatur tentang kelompok LGBT, bukan secara luas tentang warga negara Indonesia. Partai Gerindra merasa bahwa mereka membutuhkan hukum spesifik yang dapat mengatur mereka. Karena tidak adanya hukum yang menolak kelompok LGBT, maka kelompok LGBT tetap dianggap sebagai warga negara Indonesia, sehingga **“tidak ada larangan”** bagi mereka untuk bekerja maupun menjadi apapun yang mereka mau. Itu berarti kosakata Partai Gerindra secara tidak langsung memberi pandangan kepada pembaca bahwa hukum di Indonesia masih berpihak kepada kelompok LGBT, terutama dalam hal pekerjaan. Oleh karena itu, pihak manapun tidak seharusnya mendiskriminasi mereka dalam mendapatkan pekerjaan karena orientasi seksualnya.

Partai Gerindra tetap bersikeras dengan pendapatnya bahwa mereka **“menyuarakan”** hak kelompok LGBT untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam tweet-nya **“... Tidak mendukung perilakunya, dan menyuarakan haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak”**. Ini lah yang coba mereka sampaikan kepada pembaca dengan membatasi pandangan pembaca agar mereka memahami realitas yang ingin disampaikan oleh Partai Gerindra.

Dengan ini menunjukkan bahwa Partai Gerindra mencoba untuk membatasi pandangan pembaca menggunakan wacana hukum dan politik. Artinya adalah mereka memberikan fakta dan bukti berupa Undang-undang Dasar 1945, Pancasila, dan sejenisnya. Tujuannya adalah agar pembaca lebih yakin dan percaya melihat peristiwa seperti yang diinginkan oleh Partai Gerindra, dalam hal ini mengenai hak kelompok LGBT dan pelanggaran yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung karena telah merenggut haknya.

b. Negatif

Dengan secara tersirat menyatakan bahwa “**kewajiban kelompok LGBT**” lebih banyak daripada warga negara Indonesia lainnya seperti yang terlihat dalam tweet “... Ada pun kewajiban dasar LGBT adalah menghormati dan mengikuti hukum serta nilai tertinggi di Indonesia yakni nilai dan norma Pancasila”, Partai Gerindra sama dengan membatasi pandangan pembaca bahwa kelompok LGBT bukan bagian dari warga negara Indonesia pada umumnya. Keinginan Partai Gerindra untuk membuat “**aturan**” khusus yang mengatur pekerjaan kelompok LGBT hingga untuk “**menjustifikasi**” kelompok tersebut menunjukkan bagaimana sikap dan maksud Partai Gerindra yang sesungguhnya. Ialah bahwa mereka juga tetap mendiskriminasi kelompok LGBT menggunakan kosakata-kosakata yang terkesan positif, tapi sesungguhnya justru meniadakan keberadaan kelompok tersebut.

Penggunaan kosakata membatasi pandangan dengan wacana hukum dan politik dalam konteks negatif terlihat tidak terlalu banyak. Hal ini dikarenakan hukum Indonesia yang meskipun kurang tegas terhadap diskriminasi terhadap kelompok LGBT, tetapi juga sebenarnya tidak ada pasal yang benar-benar mendiskriminasi secara eksplisit terhadap kelompok tersebut. Maka dari itu, sulit untuk Partai Gerindra membatasi pandangan pembaca dengan menggunakan hukum yang tidak berpihak kepada kelompok LGBT. Hukum di Indonesia tidak mendukung komunitas LGBT, tetapi juga tidak menetapkannya sebagai tindak pidana. Sudut pandang hukum positif Indonesia belum mengatur tentang LGBT secara terbuka, contohnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan RUU KUHP Indonesia yang tidak melarang adanya biseksual dan transeksual/transgender dan tidak menentukan hukuman bagi orang-orang dari kelompok LGBT (Sofyarto, 2018:89).

3.2.2 Wacana Agama

Sejak masa kemerdekaan, wacana agama – khususnya agama Islam – dan negara sudah menjadi pembahasan secara formal di dalam lembaga-lembaga dan organisasi pemerintah maupun non pemerintah, partai-partai, ormas-ormas, dari lembaga kecil hingga lembaga-lembaga tinggi negara baik lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif (Hasan, 2015:20). Hal ini pula yang menjadi alasan penulis memilih wacana agama sebagai salah satu instrumen penelitian untuk

analisis kosakata membatasi pandangan. Karena pembaca dibatasi pandangan, baik secara positif maupun negatif, untuk dapat berpikir sesuai dengan yang Partai Gerindra inginkan.

a. Positif

Wacana agama dari Partai Gerindra yang membatasi pandangan secara positif dimulai dengan bagaimana mereka membalas pembaca ketika diminta untuk belajar agama karena telah mendukung kelompok LGBT. Partai Gerindra membalas bahwa orang-orang yang mengerti dan paham tentang agama dipastikan tidak mungkin bersikap **“diskriminatif terhadap sesama manusia”** karena itu bukan ajaran agama. Setiap agama di Indonesia, dan bahkan di dunia, mengajarkan untuk **“menghargai sesama manusia”** serta **“mengasihi dan menghormati sesama manusia”**. Partai Gerindra memberi pandangan kepada pembaca untuk terus menghormati, mengasihi, dan menghargai manusia satu dan yang lainnya dengan tidak melihat latar belakang suku, agama, ras, maupun golongannya.

Pandangan tersebut coba dikuatkan dengan memberikan contoh kisah Nabi Muhammad tentang **“kasih sayangnya terhadap semua makhluk”**. Dikisahkan bahwa Nabi Muhammad **“menyelamatkan seekor anjing”** dan meminta sahabatnya melindungi anjing tersebut dari tentara-tentara yang mencoba untuk **“mengganggu anjing”** tersebut. Upaya Partai Gerindra mengarahkan pandangan pembaca dengan menggunakan kisah Nabi Muhammad ini merupakan langkah yang besar dan efektif, mengingat Indonesia yang merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, karena lebih dari 87% penduduk Indonesia menyatakan Muslim pada sensus tahun 2010³. Dan karena jumlahnya yang mayoritas, maka paling terlihat penolakannya terhadap kelompok minoritas tersebut. Oleh karena itu, Partai Gerindra mencoba untuk memberi pandangan kepada pembaca dan pendukungnya yang mayoritas beragama Islam untuk mencontoh Nabi Muhammad sebagai **“teladan yang patut dicontoh”** yang terus menyebarkan sifat kasih sayang kepada semua makhluk ciptaan Tuhan.

b. Negatif

Pengisahan kasih sayang Nabi Muhammad kepada **“binatang/hewan anjing”** oleh Partai Gerindra dalam tweet-nya “Dari kisah tersebut, bisa diambil pelajaran bahwa kasih sayang Nabi Muhammad kepada hewan tidak diskriminatif...”, menunjukkan secara tersirat bahwa Partai

³ World Population Review, *Indonesian Population*, diakses dari <https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population>, pada tanggal 15 Juni 2021, pukul 10.28 WIB.

Gerindra menganggap kelompok LGBT sebagai binatang/hewan anjing. Dengan membatasi pandangan pembaca bahwa mereka menganggap kelompok LGBT sebagai binatang, hal tersebut akan diwajarkan juga oleh pembaca karena pembaca juga akan berpikir hal yang sama. Karena meskipun tujuan Partai Gerindra adalah untuk memberikan contoh sikap kasih sayang Nabi Muhammad, tapi pengumpamaan korban sebagai anjing sebenarnya bisa diganti karena contoh cerita sikap kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya juga banyak.

Hal ini semakin diperkuat dengan pernyataan Partai Gerindra yang mengatakan bahwa LGBT adalah **“haram dan laknat”** dalam tweet-nya yang berbunyi, “Karena bagaimanapun, sekali lagi, bagaimanapun haramnya, laknatnya LGBT, mereka juga adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa kita hilangkan HAK nya begitu saja”. Meskipun Partai Gerindra meminta pembaca untuk tetap menghargai kelompok tersebut, tetapi mereka secara jelas menyebutkan kedua label tersebut. Partai Gerindra juga dengan jelas dan tersurat menyatakan bahwa mereka **“tidak membenarkan”** dan **“tidak menghalalkan perilaku LGBT”**. Hal ini memberi pandangan yang salah kepada pembaca karena hanya Allah atau Tuhan lah yang mempunyai kuasa untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Menjustifikasi dengan sebutan-sebutan tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya Partai Gerindra mempunyai *stereotype* yang buruk terhadap kelompok LGBT dan sangat meminggirkan mereka. Kosakata-kosakata tersebut juga menunjukkan bahwa Partai Gerindra ingin masyarakat luas memiliki pandangan yang sama dengannya.

Menganggap apabila kelompok LGBT membutuhkan **“penyuluhan agama”** juga menunjukkan di mana sesungguhnya Partai Gerindra berdiri seperti dalam tweet “Kami sudah memberikan masukan bgmn seharusnya pemerintah menangani hal ini. Contohnya dgn galakkan seminar tntg bahaya LGBT di sekolah-sekolah, aktifkan penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yg menyimpang dari norma agama...”. Kosakata tersebut sama saja membatasi pandangan pembaca bahwa kelompok LGBT terdiri dari orang-orang yang tidak beragama atau tidak beriman. Partai Gerindra menganggap bahwa pendekatan melalui agama bisa menjadi penyelesaian masalah bagi kelompok LGBT agar dapat keluar dari “lingkungan” atau komunitas tersebut.

Pernyataan atau anggapan tersebut kurang tepat. Salah satu contohnya yaitu Ludovic-Mohamed Zahed, seorang imam di Paris yang mengakui dirinya adalah seorang *gay* secara

terbuka⁴. Ia merupakan muslim yang taat dan merupakan pendiri *Homosexual Muslims of France*. Hal ini menunjukkan bahwa agama dan orientasi seksual adalah dua hal berbeda yang dapat berjalan beriringan tetapi tidak saling bertentangan.

3.2.3 Wacana Sosial

Analisis kosakata membatasi pandangan dalam wacana sosial menunjukkan bahwa Partai Gerindra memperhatikan kepentingan umum dengan mendiskusikan topik ini di ruang publik. Partai Gerindra membatasi pandangan secara positif dengan memberikan informasi-informasi kepada pembaca yang sering salah mengenai kelompok LGBT. Sedangkan batasan pandangan secara negatifnya justru terlihat menyudutkan kelompok LGBT dengan memperlakukan mereka secara berbeda dengan masyarakat lain.

a. Positif

Partai Gerindra menunjukkan perannya sebagai wakil dari masyarakat yang “**tidak setuju dengan keputusan Kejaksaan Agung**”. Mereka memberi pandangan kepada pembaca bahwa itu adalah upayanya untuk “**menyuarakan hak kelompok marjinal**”. Partai Gerindra mengarahkan pandangan dan menunjukkan pada pembaca bahwa mereka memiliki *power* untuk bersuara atas ketidakadilan yang terjadi di Indonesia seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tersebut. Tujuannya adalah agar pembaca dan masyarakat luas memiliki pandangan bahwa kelompok minoritas seharusnya didukung dan dibantu untuk menyuarakan hak-haknya.

Ketika ada pembaca yang mengatakan bahwa LGBT adalah gangguan kejiwaan, Partai Gerindra pun membela dengan menggunakan bukti faktual yang tertulis bahwa “**LGBT bukanlah gangguan kejiwaan**”. Partai Gerindra mencoba untuk memberi pandangan pada pembaca bahwa terdapat Pedoman Penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa yang dibuat oleh dokter-dokter ahli yang lebih mengerti terhadap hal-hal seperti itu. Selain itu Partai Gerindra juga berusaha memberi pandangan kepada pembaca bahwa dalam pedoman tersebut, sudah ditetapkan bahwa LGBT bukanlah gangguan atau penyakit jiwa, melainkan adalah sebuah orientasi seksual. Sama halnya heteroseksual (ketertarikan secara seksual pada lawan jenis), homoseksual (ketertarikan secara seksual pada sesama jenis) juga merupakan orientasi seksual.

⁴ DW, *Kisah Seorang Imam Gay di Paris*, diakses dari <https://www.dw.com/id/kisah-seorang-imam-gay-di-paris/g-39857127>, pada tanggal 7 Juni 2021, pukul 2.01 WIB.

Harapan Partai Gerindra membuka diskusi di media sosial adalah agar dapat **“menyelesaikan permasalahan LGBT”** ini dengan mendapatkan pandangan dari masyarakat luas. Karena topik pembahasan ini menyangkut kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu topik ini dijadikan diskusi terbuka yang diharapkan positif. Hal itu pun ditekankan oleh Partai Gerindra bahwa mereka **“terbuka terhadap kritik”** masyarakat, sehingga komentar yang seperti apapun akan dianggapi dengan positif sesuai dengan pendiriannya. Ini menunjukkan bahwa Partai Gerindra mengarahkan pandangan pembaca untuk lebih dapat menormalisasi topik pembahasan LGBT agar lebih banyak dibicarakan tanpa merasa tabu.

Karena topik mengenai LGBT seringkali dianggap tabu atau dibicarakan sisi negatifnya saja oleh pemerintah, maka masyarakat pun melakukan hal yang sama. Karena tidak adanya edukasi dan informasi yang benar mengenai LGBT tersebut, stigma negatif pun selalu menempel pada kelompok tersebut.

b. Negatif

Pernyataan Partai Gerindra yang mengatakan bahwa kelompok LGBT tidak memiliki hak untuk **“mengekspos dan mengembangkan perilaku LGBT”**, menunjukkan pendirian yang sesungguhnya. Partai Gerindra mencoba membatasi pandangan pembaca bahwa orang-orang dari kelompok LGBT tidak berhak untuk mengekspresikan dirinya, padahal semua masyarakat Indonesia memiliki hak atau kebebasan untuk mengekspresikan diri. Sedangkan perilaku yang dimaksud oleh Partai Gerindra adalah perilaku seksual, berbeda dengan orientasi seksual, di mana orang-orang heteroseksual pun memiliki perilaku seksual. Hal ini berhubungan dengan pernyataannya bahwa LGBT **“memiliki dampak buruk bagi kesehatan”**. Pernyataan tersebut berbahaya karena dapat menggiring opini publik untuk berpikir sedemikian rupa, dan memang itulah tujuan kosakata membatasi pandangan. Padahal apabila yang dimaksud adalah penyakit HIV/AIDS, seperti stigma LGBT biasanya, telah dijelaskan sebelumnya bahwa kelompok heteroseksual lah penyumbang paling besar virus tersebut di Indonesia. Karena HIV/AIDS merupakan virus yang menular melalui hubungan penetrasi seksual dengan individu yang berganti-ganti, bukan karena apakah orang tersebut homoseksual atau heteroseksual.

Partai Gerindra tetap bersikeras bahwa mereka **“tidak mendukung LGBT”** tetapi membantu mereka mendapatkan haknya dalam bekerja dan berkehidupan yang layak. Mendukung berarti setuju bahwa kelompok tersebut dapat bebas dari diskriminasi dan memiliki

hak untuk bahagia. Sedangkan kosakata-kosakata yang disampaikan bersifat homofobia, yang berarti ketika suatu pihak tidak percaya bahwa kelompok LGBT mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain. Bahkan menurut Partai Gerindra, **“pernyataannya bersifat multitafsir”** melalui tweet-nya “Terkait dengan ramainya perdebatan tentang LGBT dan terjadinya multitafsir terkait pernyataan twit kami yang banyak diambil secara tidak lengkap, serta dipelintir oleh oknum...” sehingga banyak yang tidak paham atau bahkan tidak ingin memahami tentang pendapatnya tersebut. Pernyataannya yang mendukung kelompok LGBT demi mendapatkan hak bekerja dan memiliki kehidupan yang layak, disebut multitafsir karena banyak pihak yang menurut mereka tidak mengerti dan mengartikannya ke dalam arti yang lain. Pernyataan Partai Gerindra sangat mudah dimengerti, hanya saja mereka kurang teguh atas pendiriannya dan terkesan plin-plan karena tidak mau dianggap mendukung kelompok tersebut. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan pernyataannya yang jelas yaitu bahwa mereka **“menolak perilaku LGBT”**. Ini menunjukkan bahwa Partai Gerindra tidak mengakui keberadaan kelompok LGBT di Indonesia dan mengarahkan pembaca untuk berpikir demikian.

Partai Gerindra merasa bahwa **“pencegahan LGBT”** adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan bantuan pemerintah dan instansi terkait seperti dalam tweet “Partai Gerindra meminta dan mendukung semua pihak untuk melakukan pencegahan LGBT sejak dini mulai dari lingkungan masyarakat hingga di area pendidikan seperti di sekolah-sekolah...” karena menurut mereka LGBT **“bertentangan dengan norma”**. Ketika Partai Gerindra mencantumkan bukti PPDGJ kepada pembaca, seharusnya mereka tahu betul bahwa LGBT bukan lah sebuah penyakit, dan oleh karena itu tidak dapat dicegah. Apabila menggunakan nalar logika yang sama, maka heteroseksual juga dapat dicegah menggunakan cara serupa. Sedangkan norma adalah patokan hidup yang merupakan konstruksi masyarakat yang dibuat agar masyarakat merasa damai. Maka apabila pembaca terus berpandangan seperti itu, sampai kapanpun kelompok LGBT tidak akan pernah diterima di tengah masyarakat. Hal ini ditekankan pula dengan pendapat Partai Gerindra mengenai **“bahaya LGBT”**, di mana pendapat tersebut justru berbahaya bagi kelompok LGBT sendiri dan dapat mengancam kehidupan mereka. Sudah banyak berita di mana kelompok LGBT menjadi sasaran kebencian dan persekusi hanya karena orientasi seksual mereka, seperti *sweeping*, pengusiran, bahkan pemenjaraan orang-orang dari kelompok tersebut. Tujuan Partai Gerindra menggunakan kosakata tersebut untuk membatasi

pandangan pembaca hingga berpikiran yang sama merupakan penggiringan opini yang sangat berbahaya dan menyudutkan kelompok LGBT karena memberikan fakta yang salah.

Penyebutan “**disorientasi seksual**” juga merupakan batasan pandangan sehingga pembaca dapat berpikir bahwa orientasi seksual LGBT salah karena disorientasi atau kebingungan tersebut. Orientasi seharusnya berarti kecenderungan, di mana semua orang memiliki orientasi seksual, termasuk heteroseksual atau yang disebut “**normal**” oleh Partai Gerindra seperti pada tweet “Jangankan LGBT, yg normal pun ada yg memperkosa atau melakukan pelecehan seksual juga ke lawan jenisnya...”. Kosakata tersebut membatasi pandangan pembaca sehingga pembaca dapat berpandangan bahwa LGBT adalah sesuatu yang abnormal. Sebutan normal tersebut tidak seharusnya diwajibkan, dan diganti oleh sebutan ‘heteroseksual’.

Kosakata-kosakata Partai Gerindra masih bersifat diskriminatif walaupun kadang tidak terlalu jelas terlihat. Kosakata-kosakata diskriminatif tersebut cenderung mengarah pada homofobia. Homofobia tidak melulu harus penuh dengan kekerasan, tetapi apabila mereka tidak mengakui hak dasar kelompok LGBT sebagai warga negara Indonesia, itu merupakan salah satu contoh homofobia.

3.3 Kosakata: Pertarungan Wacana

Setiap pihak memiliki versi opini atau pendapat yang berbeda dalam sebuah pernyataan, dan pihak-pihak tersebut mengupayakan supaya pendapatnya yang dianggap paling benar dan dapat lebih berpengaruh kepada opini publik. Dalam upayanya untuk merebut opini publik tersebut, setiap pihak menggunakan kosakata mereka sendiri untuk memaksakan agar kosakata tersebut yang dapat lebih diterima oleh masyarakat luas (Eriyanto, 2011:140-141).

Kosakata pertarungan wacana yang diambil dari Twitter @Gerindra dibedakan menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Selain itu kosakata pertarungan wacana ini adalah pertarungan antara Partai Gerindra dan orang-orang yang menanggapi. Positif berarti kosakata tersebut cenderung membela atau tidak mengecilkan kelompok LGBT, sedangkan negatif berarti kosakata tersebut tidak berpihak dan cenderung merugikan kelompok LGBT, ataupun tidak setuju dengan pendapat @Gerindra.

3.3.1 Wacana Hukum dan Politik

Analisis kosakata pertarungan wacana antara Partai Gerindra dengan pembaca ataupun antara Partai Gerindra dengan Kejaksaan Agung mengenai kelompok LGBT banyak menggunakan wacana hukum dan politik karena Partai Gerindra menggunakan hukum sebagai dasar atau latar belakang mereka dalam membantu kelompok LGBT mendapatkan haknya.

a. Positif

Pertarungan wacana memiliki arti bahwa terdapat dua wacana yang berbeda dari masing-masing pihak mengenai topik yang sama. Kosakata Partai Gerindra yang menyampaikan “**yang terhormat Kejaksaan Agung**” menunjukkan rasa hormatnya terhadap Kejaksaan Agung sebagai salah satu lembaga hukum di Indonesia, meskipun wacana Partai Gerindra dan wacana Kejaksaan Agung sangat lah berbeda dalam topik LGBT ini. Di mana Kejaksaan Agung memiliki wacana menolak kelompok LGBT untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, sedangkan wacana Partai Gerindra adalah bahwa kelompok LGBT adalah bagian dari warga negara Indonesia yang sudah seharusnya tidak dihalangi untuk mendapatkan pekerjaan tersebut karena semua warga memiliki hak yang sama. Partai Gerindra melawan pernyataan Kejaksaan Agung karena dianggap “**bertentangan dengan nilai Pancasila**”, sedangkan Kejaksaan Agung melakukan hal tersebut karena “Kita kan pengen yang normal, yang wajar-wajar saja. Kita tidak mau yang aneh-aneh”⁵.

Bahkan Partai Gerindra memiliki wacana untuk meminta instansi terkait agar “**membuat payung hukum**” bagi kelompok LGBT seperti pada tweet “Partai Gerindra meminta Pemerintah dan instansi terkait segera membuat payung hukum yang jelas...”, karena menurutnya diskriminasi Kejaksaan Agung terhadap kelompok tersebut telah “**melanggar konstitusi negara**”. Partai Gerindra memberikan wacana sesuai dengan hukum yang ada kepada salah satu lembaga hukum tinggi di Indonesia. Partai Gerindra juga menegaskan bahwa “**tidak ada larangan**” bagi kelompok LGBT untuk bekerja atau menjadi apapun karena bekerja dan menjadi apapun adalah hak semua warga negara Indonesia dan semua warga “**tidak boleh menghilangkan hak**” kelompok tersebut. Wacana Partai Gerindra dengan menganggap kelompok LGBT tetap merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama ini, ditujukan untuk mengoreksi Kejaksaan Agung serta untuk mengatakan kepada

⁵ Adhi Wicaksono, *Kejaksaan Agung Tolak Pelamar CPNS LGBT*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191121163515-20-450375/kejaksaan-agung-tolak-pelamar-cpns-lgbt>, pada tanggal 7 Juni 2021, pukul 15.22 WIB.

pembaca bahwa perbuatan diskriminasi seperti yang dilakukan Kejaksaan Agung adalah perbuatan yang salah.

Kemudian yang coba dilakukan Partai Gerindra adalah untuk membantu “**suarakan**” diskriminasi tersebut seperti dalam tweet-nya “... Yang kami suarakan sekarang adalah hak mereka dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak...”. Wacana Partai Gerindra adalah agar kelompok LGBT tidak kehilangan haknya dan mendapatkan apa yang mereka inginkan sama halnya seperti masyarakat lainnya. Undang-undang (UU) Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 melarang segala bentuk diskriminasi dengan tegas. Dalam UU tersebut tidak disebutkan bahwa identitas gender atau orientasi seksual dapat menjadi dasar dalam melakukan diskriminasi. Hal ini yang coba disampaikan oleh Partai Gerindra meskipun mereka tidak mencantumkan peraturan tersebut, tetapi wacananya adalah bahwa tidak seharusnya siapapun didiskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan.

b. Negatif

Sayangnya wacana Partai Gerindra bersifat kontradiktif sendiri. Setelah menyampaikan bahwa hak dan kewajiban tiap warga negara sama, selanjutnya mereka berkata secara tersirat bahwa “**kewajiban kelompok LGBT**” seharusnya diletakkan. Wacana yang bertentangan dengan wacananya sendiri ini terkesan tidak biasa karena biasanya pertarungan wacana terjadi antara dua pihak atau lebih, tapi kali ini terjadi dengan diri sendiri. Selain itu, ada satu lagi wacana Partai Gerindra yang kontradiktif dengan ucapannya sendiri. Awalnya mereka meminta pemerintah dan instansi untuk membuat payung hukum, namun ternyata payung hukum tersebut ingin dibuat dengan tujuan untuk “**menjustifikasi kelompok LGBT**” agar bisa dibedakan ketika di tempat umum. Wacana yang berseberangan ini menunjukkan bagaimana Partai Gerindra terkesan plin-plan dengan pernyataannya tersebut.

Wacana negatif yang berkaitan dengan hukum dan politik juga disampaikan oleh pembaca yang menganggap bahwa LGBT adalah sama dengan “**pedofil**” yang berbahaya dan perlu dihukum dalam tweet “Pantas sangat susah membasmi akun2 pedofil dan LGBT, ternyata ada parpol pembelanya”. Wacana ini sangat membahayakan kelompok LGBT karena itu merupakan dua hal tidak bisa disamakan dan sangat berbeda. Pedofilia adalah perilaku sosial ketika orang dewasa melakukan perbuatan seksual terhadap anak kecil yang belum memiliki *age of consent*, sedangkan LGBT adalah orientasi seksual di mana hal tersebut berbeda dengan perilaku seksual.

Sudah banyak hukum yang mengatur tentang pedofilia, diantaranya adalah dalam KUHP pasal 287 tentang pemerkosaan terhadap anak yang belum berumur 15 tahun, 290 tentang perbuatan cabul terhadap orang yang tidak sadar, 293 tentang membujuk berbuat cabul terhadap orang yang belum dewasa, 294 tentang perbuatan cabul terhadap anak dan perbuatan cabul di lingkungan kerja/institusi, dan 295. Sedangkan menurut UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, diatur dalam pasal 78, 82, dan 88. Semua pasal di atas menjelaskan tentang ketentuan dan jenis pidana yang diberikan kepada pelaku yaitu berupa sanksi pidana penjara dan denda.

Wacana negatif selanjutnya adalah terdapat pembaca yang mengatakan pernyataan Partai Gerindra mengenai LGBT ini merupakan “**blunder**” atau kekeliruan, kesalahan serius, dan kekhilafan seperti yang disampaikan dalam tweet “... Ingat anda, partai anda di dukung oleh pemilih yg menjunjung nilai dan moral maka anda dan partai anda jangan blunder di bagian ini karena resikonya anda dan partai anda bisa di tinggal para pemilih yg anti LGBT”. Hal ini menunjukkan bahwa pembaca tersebut menganggap dukungan Partai Gerindra adalah kesalahan serius, entah itu disengaja atau tidak. Padahal sampai di akhir tweet pun Partai Gerindra tetap berpendirian bahwa mereka bertujuan untuk membantu kelompok LGBT mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan, tetapi bukan mendukung secara keseluruhan.

3.3.2 Wacana Agama

Wacana agama, khususnya agama Islam, masih terus berkembang pesat sampai saat ini. Analisis kosakata pertarungan wacana dalam wacana agama ini dipilih penulis karena Partai Gerindra yang sejak awal menggunakan wacana hukum dan politik tapi dilawan mayoritas pembaca dengan menggunakan wacana agama. Sehingga Partai Gerindra juga terpaksa menggunakan wacana agama untuk menanggapi karena posisi agama, khususnya agama Islam, masih memiliki kuasa di atas negara Indonesia.

a. Positif

Partai Gerindra melawan wacana pembaca yang menganggap mereka tidak paham agama karena mendukung kelompok LGBT dengan mengatakan bahwa yang bertindak “**diskriminatif**” adalah orang-orang dengan pemahaman agama yang kurang karena tweet-nya berbunyi “... Apakah sesama manusia dibenarkan untuk bertindak diskriminatif?”. Oleh karena itu Partai Gerindra juga menyampaikan wacana menggunakan kisah “**kasih sayang Nabi Muhammad**” yang “**menyelamatkan seekor anjing**” dan meminta sahabatnya untuk melindunginya dari tentara-

tentara yang mencoba “**mengganggu anjing**” tersebut. Wacana Partai Gerindra ini memiliki tujuan agar pembaca meniru “akhlak mulia Nabi Muhammad” untuk tidak mendiskriminasi sesama makhluk ciptaan Tuhan karena merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan agama.

Wacana yang ingin disampaikan oleh Partai Gerindra kepada pembaca adalah bahwa agama mengajarkan manusia untuk “**mengasihi dan menghormati sesama manusia**” serta “**menghargai sesama manusia**”. Walaupun sebenarnya wacana untuk mengasihi, menghormati, dan menghargai sesama manusia adalah pengetahuan dasar yang harus dimiliki semua manusia, tetapi pada kenyataannya banyak sekali intoleransi yang terjadi khususnya di Indonesia.

b. Negatif

Wacana yang disampaikan pembaca adalah bahwa “**Partai Gerindra khilaf**”, atau melakukan kesalahan secara tidak sengaja karena pernyataannya terhadap kelompok LGBT dalam tweet-nya “... Kl salah ketik, ngaku aja khilaf...”. Dengan menyebut kosakata tersebut, secara tersirat pembaca ingin Partai Gerindra secepat mungkin meminta maaf dan mengakui kesalahan atas pernyataannya tersebut. Selain itu juga ada pembaca yang menyatakan bahwa “**LGBT berdosa**” dan “**LGBT haram**”. Wacana tersebut dapat semakin langgeng apabila banyak yang membacanya, apalagi jika ada hal yang melatarbelakangi wacana tersebut. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa yang dapat menghakimi dosa, halal, haram, hanyalah Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh Partai Gerindra bahwa yang seharusnya dilakukan manusia adalah menghargai, menghormati, dan mengasihi sesamanya.

3.3.3 Wacana Sosial

Sebagai salah satu partai berpengaruh di negara demokrasi, penulis melihat banyaknya penggunaan wacana sosial bermasyarakat dalam kosakata pertarungan wacana. Kontradiksi wacana antara Partai Gerindra dengan pembaca menunjukkan kekhawatiran pembaca dalam hidup berdampingan dengan kelompok LGBT.

a. Positif

Wacana yang coba disampaikan oleh Partai Gerindra kepada pembaca adalah bahwa “**LGBT bukanlah gangguan kejiwaan**”. Hal ini pun ditekankan dengan membeberkan poin F66 dalam PPDGJ II dan III agar pembaca semakin yakin dan percaya bahwa hal tersebut merupakan hasil penelitian para ahli di bidangnya. Tujuan Partai Gerindra adalah agar tidak ada lagi pembaca

atau masyarakat luas yang mengatakan bahwa LGBT adalah gangguan atau penyakit kejiwaan. Karena apabila masih dianggap seperti itu, berarti juga dianggap bahwa LGBT dapat disembuhkan atau diobati karena hampir semua penyakit kejiwaan dapat diberi tindakan agar pulih.

Partai Gerindra juga secara tersirat mencoba untuk menyampaikan wacananya mengenai tujuannya mendiskusikan hal tersebut di *public space* yaitu karena mereka ingin dapat “**menyelesaikan permasalahan LGBT**”, khususnya mengenai diskriminasi yang mereka alami, bersama dengan masyarakat luas. Karena diskriminasi terhadap kelompok LGBT bukan hanya dilakukan oleh Kejaksaan Agung, tetapi juga oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Maka dari itu Partai Gerindra berharap mendapatkan jalan keluar yang baik.

Selain itu Partai Gerindra juga menyampaikan wacananya bahwa mereka teguh dengan pendiriannya dan mau debat dengan siapapun atau bagaimanapun, “**opiniya tidak akan berubah**” mengenai dukungannya dalam menyuarkan ketidakadilan terhadap kelompok LGBT. Kelompok LGBT sudah sangat sering mendapatkan diskriminasi, perundungan, hingga persekusi, apalagi sejak tahun 2016 ketika ada diskusi organisasi mengenai gender. Kelompok LGBT semakin terekspos oleh serangan-serangan kebencian dari masyarakat hingga pemerintah sendiri.

b. Negatif

Wacana negatif ini datang dari pembaca yang mengatakan bahwa “**LGBT adalah penyakit kejiwaan**”, meskipun sudah dijelaskan oleh Partai Gerindra sebaliknya. Tapi orang-orang yang teguh pada pendiriannya yang salah ini tetap mengatakan hal tersebut. Hal ini berbahaya apabila ada pembaca yang membaca pernyataan ini dan tidak membaca pernyataan yang benar dari Partai Gerindra.

Pembaca lain menyampaikan wacana bahwa mereka “**tidak mau berkembang biak dengan sesama jenis**”. Hal ini lucu karena tidak ada seorang pun, bahkan Partai Gerindra, yang meminta mereka untuk berhubungan seksual dengan orang-orang dari kelompok LGBT. Kosakata ‘berkembang biak’ pun terkesan *problematic* karena kosakata tersebut biasanya digunakan untuk menggambarkan binatang dan tumbuhan, bukan manusia. Maka wacana tersirat yang disampaikan adalah bahwa pembaca menyamakan binatang dan tumbuhan dengan orang-orang dari kelompok LGBT. Pemahaman pembaca dengan wacana bahwa orang-orang heteroseksual adalah “**normal**”, sedangkan orang-orang homoseksual adalah ‘abnormal’ merupakan

pemahaman yang salah dan menyesatkan. Wacana tersebut berusaha menunjukkan bahwa orang-orang heteroseksual mempunyai *power* yang lebih karena dianggap normal atau wajar. Hal ini juga yang membuat pembaca berwacana bahwa “**LGBT jijik**” pada tweet “... Politik kotor tp tdk jg sampe jijik kelakuannya...” dan “**tidak beradab**” pada tweet “Baca definisi beradab min biar tau LGBT beradap apa engga”. Kosakata jijik biasanya digunakan pada kotoran dan sebagainya. Sehingga dengan begitu pembaca berwacana bahwa kelompok LGBT sama dengan kotoran yang menjijikkan. Sedangkan mengatakan bahwa mereka tidak beradab berarti adalah bahwa mereka tidak memiliki budi pekerti atau sopan santun yang baik. Padahal adab seseorang tidak bergantung pada orientasi seksualnya melainkan bergantung pada masing-masing individu.

Pembaca yang cenderung mencemooh dengan mengatakan bahwa “**Partai Gerindra bertele-tele**” karena dianggap tidak jelas dalam menyampaikan pendapat dan hanya berputar-putar saja, menunjukkan wacana yang merendahkan Partai Gerindra dan tidak menghargai pendapat yang telah disampaikan. Wacana pembaca mayoritas mengatakan bahwa mereka “**tidak mendukung LGBT**” dan “**tidak mengizinkan LGBT di Indonesia**”. Kosakata tersebut memiliki wacana bahwa mereka tidak mengakui bahwa kelompok LGBT sudah ada di Indonesia. Sikap tidak mengakui dan tidak ingin tahu tersebut adalah sikap *ignorant* atau tidak peduli yang dapat menyebabkan sikap cuek namun cenderung tidak berpihak kepada kelompok minoritas tersebut.

Wacana dari pembaca berikutnya yang memiliki kesan *ignorant* adalah karena mereka menganggap bahwa seseorang dapat “**terjebak dalam LGBT**” seperti dalam tweet “... Gimana HAK anak orang yg dimonon pantatnya, jadi korban sodomi, jadi korban pergaulan bebas, lesbian, transgender, terpaksa krn rayuan2 maut, atau terjebak didalam LGBT?”. Wacana tersebut memiliki arti bahwa orang-orang dari kelompok LGBT dengan sengaja ‘menjebak’ orang lain agar masuk ke dalam kelompok tersebut. Wacana seperti ini sangat menyesatkan dan dapat menggiring opini masyarakat untuk berpikir hal yang sama. LGBT merupakan orientasi seksual, di mana tidak ada orang yang bisa keluar atau masuk ke dalam ‘komunitas’ tersebut.

3.4 Kosakata: Marjinalisasi

Roger Fowler berargumen bahwa pilihan bahasa tertentu, baik itu kata, kalimat, ataupun preposisi, memiliki nilai ideologi tertentu. Maksudnya adalah penggunaan kata, frasa, susunan, format kalimat, dan preposisi bukan hanya masalah teknis tata bahasa atau linguistik, tetapi

ekspresi dari sistem idealis: merupakan upaya untuk membentuk pendapat umum, menegaskan, serta membuat pihak sendiri benar dan mengucilkan atau menyalahkan pihak lain.

Pilihan kosakata yang digunakan tidak hanya dipahami untuk menangani masalah teknis dan ejaan, tetapi juga memiliki aspek ideologis. Cara seorang aktor dibahas dalam kata dan cara tertentu peristiwa itu digambarkan memengaruhi makna ketika masyarakat menerimanya. Kosakata marjinalisasi yang diambil dari Twitter @Gerindra menunjukkan marjinalisasi atau pembatasan yang dilakukan oleh Partai Gerindra maupun pembaca yang menanggapi terhadap kelompok LGBT.

3.4.1 Wacana Hukum dan Politik

Keterasingan kelompok LGBT dapat terjadi dalam bentuk apapun, baik yang diungkapkan dengan kata-kata, gerak tubuh, tindakan, dan lain-lain, melalui tanda-tanda yang membuat identitas kelompok LGBT tidak terlihat oleh publik. Dalam hal ini, marjinalisasi terjadi dalam bentuk reproduksi bahasa dengan wacana hukum dan politik. Artinya adalah bahwa kelompok LGBT dipinggirkan menggunakan istilah-istilah dalam hukum dan politik.

Mengutarakan bahwa seakan “**kewajiban kelompok LGBT**” lebih banyak dari masyarakat lainnya adalah marjinalisasi yang dilakukan Partai Gerindra secara tersirat. Artinya adalah kelompok LGBT wajib melakukan hal-hal lebih yang tidak diwajibkan untuk masyarakat lainnya. Itu menunjukkan bahwa Partai Gerindra tidak menganggap kelompok LGBT sebagai warga negara Indonesia dan menganggap mereka hanya ‘liyan’. Hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang dikatakannya tentang kelompok LGBT yang merupakan bagian dari warga negara Indonesia dengan hak yang sama.

Partai Gerindra menyampaikan secara tersirat bahwa mereka akan “**menjustifikasi kelompok LGBT**” apabila ada hukum yang mendukung agar dapat membedakan kelompok tersebut dengan orang-orang lainnya, merupakan sikap marjinalisasi yang sangat terlihat jelas. Marjinalisasi dan diskriminasi ini sangat terasa jelas dan disayangkan mengingat tujuan awal Partai Gerindra adalah untuk menyuarakan ketidakadilan yang terjadi terhadap kelompok tersebut. Hal ini semakin diperkuat dengan dibutuhkannya “**aturan**” yang menurut Partai Gerindra dapat memberikan batas-batas yang jelas yang mengatur kelompok tersebut. Partai Gerindra lagi-lagi menunjukkan marjinalisasi dan diskriminasi dengan keinginannya untuk menerapkan batasan-batasan kepada kelompok LGBT dan masyarakat heteroseksual lainnya. Apabila Partai Gerindra benar-benar menganggap kelompok LGBT sebagai warga negara

Indonesia yang harus diberikan dan dilindungi hak miliknya seperti sebagaimana mestinya, Partai Gerindra tidak seharusnya susah payah meminta dibuatkan aturan khusus yang juga akan digunakan untuk menjustifikasi kelompok tersebut.

3.4.2 Wacana Agama

Marjinalisasi banyak terjadi dalam bentuk wacana agama karena peran kuat agama di negara ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini yang membuat pembaca, bahkan Partai Gerindra, masih terus menerus melanggengkan marjinalisasi menggunakan wacana agama.

Pengumpamaan sebagai “**anjing**” seperti dalam tweet “...Nabi Muhammad pernah ‘menyelamatkan’ seekor anjing yang sedang menyusui anak-anaknya” sebagai “**hewan yang diharamkan**” yang digunakan untuk menggambarkan kelompok LGBT merupakan marjinalisasi yang bersifat sangat merendahkan. Walaupun tidak terang-terangan menyebut kelompok LGBT dengan kosakata tersebut, tapi pengandaian kisah yang diceritakan membuat seolah-olah kelompok LGBT disamakan dengan hewan yang diharamkan, yaitu anjing. Marjinalisasi selanjutnya adalah kosakata Partai Gerindra yang berkata bahwa meskipun “**haramnya dan laknatnya LGBT**”, mereka juga mempunyai hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Walaupun keseluruhan pernyataan memiliki nada yang positif dan mendukung kelompok LGBT, tetapi Partai Gerindra secara jelas menyebut kelompok tersebut dengan sebutan haram dan laknat, di mana sebutan tersebut adalah serendah-rendahnya suatu hal yang negatif dalam perspektif agama Islam. Sesungguhnya juga tidak ada yang boleh melabeli manusia dengan ucapan haram dan laknat, hanya Tuhan yang boleh melakukannya.

Marjinalisasi dilakukan oleh pembaca yang menanggapi dengan generalisasi yang mengatakan bahwa orang-orang dari kelompok LGBT sudah pasti “**kurang iman**” seperti dalam tweet-nya “Tolong min, kita tegaskan sekali lagi mereka itu perlunya dibuat NORMAL dahulu, br lah Mau memberikan haknya. Tolong sadarlah: begini akibat kurangnya iman”. Dengan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa pembaca tersebut menganggap LGBT terjadi karena kurangnya pemahaman orang-orang tersebut akan agama. Hal ini tentu saja salah karena orientasi seksual dan agama adalah dua hal yang berbeda tetapi dapat berjalan beriringan.

3.4.3 Wacana Sosial

Marjinalisasi dalam wacana sosial banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, biasanya dalam bentuk diskriminasi ucapan maupun tindakan, seperti mengolok sampai menjauhi orang-orang yang terbuka mengenai identitas gender atau orientasi seksualnya, baik itu disengaja maupun keterbukaan yang tidak disengaja.

Dengan mengatakan bahwa kelompok LGBT “**tidak memiliki hak untuk mengekspose dan mengembangkan perilaku LGBT**”, menunjukkan bagaimana Partai Gerindra memarjinalkan kelompok tersebut dengan menganggapnya berbeda. Hak untuk mengekspresikan diri yang seharusnya dimiliki oleh semua warga negara Indonesia dirampas hanya karena orientasi seksual yang berbeda. Kosakatanya yang mengatakan bahwa Partai Gerindra “**tidak mendukung LGBT**” sudah memiliki makna tersirat bahwa kelompok LGBT adalah kelompok marjinal atau minoritas yang membutuhkan dukungan masyarakat luas bahkan tokoh politik dan pemerintah. Hal ini menunjukkan marjinalisasi kelompok LGBT karena secara tidak langsung dianggap berbeda dan tidak berdaya.

Partai Gerindra memarjinalisasi kelompok LGBT dengan menganggap bahwa kelompok tersebut “**memiliki dampak buruk bagi kesehatan**”. Hal ini sama saja melanggengkan stigma negatif yang selama ini menempel kepada kelompok tersebut. Dan apabila Partai Gerindra sebagai pihak yang berkuasa terus menerus melakukan itu, maka stigma tersebut juga tidak akan kunjung lepas. Marjinalisasi yang dilakukan Partai Gerindra selanjutnya adalah menganggap bahwa “**pencegahan LGBT sejak dini**” perlu dilakukan. Partai Gerindra memahami bahwa LGBT adalah suatu orientasi seksual, oleh karena itu seharusnya paham juga bahwa orientasi seksual tidak dapat diubah, dicegah atau pun disembuhkan. Tetapi mereka tetap menulis kosakata tersebut, menunjukkan bahwa Partai Gerindra bersikap *ignorant* karena telah memarjinalkan kelompok tersebut.

Dengan penggunaan kosakata “**indikasi LGBT**” dalam tweet “... Bagaimana peran Pemerintah dan kita semua dalam mencegah indikasi LGBT sejak dini...” dan “**bahaya LGBT**” dalam tweet “Buat undang-undang yang jelas terkait LGBT, galakan seminar tentang bahaya LGBT di sekolah-sekolah...”, Partai Gerindra dengan jelas memarjinalkan kelompok tersebut karena dianggap sebagai penyakit dan berbahaya. Indikasi adalah tanda-tanda yang biasanya menunjukkan suatu penyakit, sedangkan bahaya adalah kecelakaan yang bisa mengancam nyawa seseorang. Keduanya merupakan label yang salah yang digunakan untuk menggambarkan

kelompok LGBT. Hal ini apabila diteruskan maka akan semakin melanggengkan *stereotype* buruk tentang kelompok tersebut. Belum lagi pernyataan Partai Gerindra yang memarjinalkan kelompok LGBT dengan menganggapnya sebagai “**perilaku menyimpang**”. Menyimpang yang dimaksud adalah menyimpang dari nilai-nilai norma sosial yang merupakan konstruksi masyarakat, bukan aturan tertulis yang bersifat wajib. Norma sosial hanya digunakan sebagai pedoman untuk berbuat hal-hal yang tidak meresahkan. Pernyataan Partai Gerindra yang mengatakan bahwa LGBT adalah “**disorientasi seksual**”, walaupun sebelumnya sempat menulis ‘orientasi seksual’, menunjukkan bagaimana mereka tidak teguh dalam pendiriannya dengan marjinalisasi tersebut. Disorientasi secara singkat memiliki arti ‘kebingungan’, berarti bahwa Partai Gerindra memarjinalkan kelompok LGBT dengan secara tidak langsung menganggap bahwa mereka sedang berada dalam fase bingung atau kehilangan arah.

LGBT secara tidak langsung dimarjinalkan sebagai tidak normal atau abnormal karena penggunaan kosakata Partai Gerindra yang mengelompokkan orang-orang heteroseksual dengan kosakata “**normal**”. Secara tidak langsung juga Partai Gerindra menganggap orang-orang ‘normal’ lah yang memiliki kuasa, sedangkan yang ‘abnormal’ dimarjinalkan. Kosakata marjinalisasi selanjutnya adalah karena Partai Gerindra menanggapi tweet pembaca mengenai masalah “berkembang biak”. Sayangnya Partai Gerindra juga menanggapi dengan menggunakan kosakata yang sama. Hal tersebut secara tidak langsung memarjinalkan kelompok LGBT dengan menganggap mereka sama dengan binatang atau tumbuhan.

3.5 Efek Kalimat Pasif: Penghilangan Pelaku

Tata bahasa tidak hanya terkait dengan masalah teknis bahasa, juga bukan hanya tentang cara menulis, karena bentuk kalimat menentukan makna yang dihasilkan oleh struktur kalimat. Terdapat dua bentuk kalimat yang biasa ditemui, yaitu kalimat aktif dan pasif. Dalam kalimat aktif, fokusnya adalah pelaku atau aktor dari suatu tindakan, sedangkan dalam kalimat pasif fokusnya adalah saran dari aktor atau tindakan.

Efek kalimat pasif penghilangan pelaku yang diambil dari Twitter @Gerindra tidak dibedakan menjadi positif dan negatif. Berikut adalah kosakata-kosakata pasif dalam wacana-wacana yang digunakan oleh Partai Gerindra yang diambil dari akun twitter resminya pada tanggal 29 November 2019:

3.5.1 Wacana Hukum dan Politik

Kalimat pasif yang digunakan berikut ini memiliki wacana hukum dan politik apabila dilihat bersamaan dengan konteksnya secara keseluruhan. Namun kalimat atau kosakata pasif yang memiliki wacana hukum dan politik tidak banyak digunakan oleh Partai Gerindra.

Pada kosakata “**dilarang**” dalam tweet “Karena tidak ada aturan tertulis yang menyatakan LGBT dilarang mendapatkan pekerjaan...”, wacananya adalah Partai Gerindra menyalahkan pemerintah Indonesia karena tidak memiliki aturan khusus untuk kelompok LGBT. Pelaku adalah pihak yang bertugas membuat peraturan tertulis yaitu pemerintah Indonesia. Alasan Partai Gerindra menghilangkan pelaku adalah karena tweet ini memiliki makna tersirat.

Kosakata “**diamanatkan**” dalam tweet-nya yang berbunyi “... Sesuai yang diamankan oleh UUD 1945”, memiliki wacana tentang bagaimana Partai Gerindra menggunakan UUD 1945 sebagai dasar pembelaan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kelompok LGBT sesuai dengan hak yang tertulis. Pelaku dalam kalimat pasif ini adalah Partai Gerindra, tetapi mereka tetap menuliskan dengan kata ganti ‘kami’.

3.5.2 Wacana Agama

Wacana agama tetap banyak digunakan dalam efek kalimat pasif penghilangan pelaku, karena masih banyaknya pembaca yang membahas atau mendebat Partai Gerindra dengan menggunakan wacana agama. Meskipun begitu, pelaku atau subjek tidak dihilangkan karena subjek tersebut lah yang ingin Partai Gerindra tonjolkan dalam kalimat atau tweet-nya.

Wacana dalam kalimat pasif “**dibenarkan**” adalah ketika ada pembaca yang menyarankan Partai Gerindra untuk banyak belajar agama karena telah mendukung kelompok LGBT dalam tweet “... Apakah sesama manusia dibenarkan untuk bertindak diskriminatif?”. Pada kalimat pertama, pelaku yang bernama Bung Rido ditulis/disebutkan oleh Partai Gerindra, tetapi pada kalimat ke dua di mana ada kosakata pasif “dibenarkan”, pelaku sudah tidak lagi ditulis/dihilangkan. Tanpa dituliskan pun orang-orang yang membaca akan tahu siapa yang dimaksud oleh Partai Gerindra. Namun tujuan Partai Gerindra tetap menuliskan di awal kalimat adalah agar pembaca tahu siapa kah orang yang bertindak diskriminatif dengan menggunakan alasan agama.

Kedua kosakata pasif “**dimakan**” dan “**diharamkan**” dalam tweet “... namun beliau juga mencurahkan kasih sayangnya pada hewan yang tidak boleh dimakan dan diharamkan seperti

anjing”, disampaikan Partai Gerindra ketika mereka sedang memberi contoh kisah tauladan Nabi Muhammad. Wacana dari kalimat lengkapnya adalah bahwa sesama makhluk hidup harus saling mengasihi seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Namun begitu, konteks kedua kosakata pasif di atas adalah bahwa Nabi Muhammad tetap menyayangi binatang yang tidak boleh dimakan dan diharamkan seperti anjing. Maka pelaku atau subjek dalam kalimat ini, meski konteksnya positif, adalah Nabi Muhammad. Namun karena itu adalah Nabi, maka Partai Gerindra tidak menghilangkannya dengan tujuan agar ceritanya lebih jelas dan lebih mudah dipahami.

Pada kosakata pasif “**diceritakan**” yang tertulis dalam tweet “Disana diceritakan di tengah perjalanan...”, wacana yang dimaksudkan adalah Partai Gerindra menceritakan kasih sayang Nabi Muhammad kepada sesama makhluk hidup. Pelaku yang menceritakan adalah Al-Bukhari dan Muslim, dihilangkan dalam tweet ini tetapi tetap ditulis pada tweet sebelumnya. Tujuannya adalah berhadapan agar pembaca sudah paham karena telah ditulis di tweet sebelumnya.

Kosakata pasif “**diambil**” memiliki wacana bahwa Partai Gerindra mengharapkan pembaca atau masyarakat dapat mengambil contoh sikap kasih sayang Nabi Muhammad karena tweet-nya berbunyi “Dari kisah tersebut, bisa diambil pelajaran bahwa kasih sayang Nabi Muhammad kepada hewan tidak diskriminatif...”. Pelaku pada kalimat pasif ini adalah pembaca atau masyarakat yang tidak dituliskan dalam kalimat tersebut tetapi tetap dapat dibaca dan dipahami dengan baik.

Pada kosakata “**diajarkan**” pada tweet “... Dan kami yakin juga, di agama manapun, pasti diajarkan untuk saling mengasihi dan menghormati kepada sesama manusia, terlepas dari segala perilakunya”, Partai Gerindra mencoba memberi wacana kepada pembaca bahwa tidak ada agama yang membenarkan LGBT, tetapi juga semua agama mengajarkan sikap saling mengasihi dan menghormati sesama manusia. Maka pelaku yang dimaksud adalah ‘agama’, di mana pelaku tersebut tidak dihilangkan karena itu lah yang menjadi pusat pertanyaan dan jawaban.

3.5.3 Wacana Sosial

Dalam wacana sosial ini, kalimat pasif cukup banyak digunakan oleh Partai Gerindra dalam tweet-nya karena digunakan untuk membalas tanggapan pembaca, yang memiliki jumlah tweet lebih banyak dari tweet pernyataan Partai Gerindra sendiri. Terlebih lagi karena diskusi ini melibatkan masyarakat umum pengguna Twitter.

Kalimat pasif menggunakan kosakata “**dilakukan**” dalam tweet “Penolakan yang dilakukan terhadap kaum LGBT sebagai CPNS oleh @KejaksaanRI sangat tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai Pancasila khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab” dan juga pada tweet “... Penolakan yang dilakukan oleh @KejaksaanRI telah melanggar hak atas pekerjaan yang terkandung dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia”, memiliki konteks tentang penolakan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap kelompok LGBT untuk mendapatkan pekerjaan. Wacana ini menjelaskan bahwa kelompok LGBT tidak diperbolehkan untuk mendaftar sebagai CPNS oleh Kejaksaan Agung sebagai pelaku. Tetapi penulisan pelaku tidak dihilangkan oleh Partai Gerindra karena Partai Gerindra ingin pembaca tahu dan paham siapa yang melakukan diskriminasi tersebut.

Kosakata pasif “**dipelintir**” dalam tweet “Terkait dengan ramainya perdebatan tentang LGBT dan terjadinya multitafsir terkait pernyataan twit kami yang banyak diambil secara tidak lengkap, serta dipelintir oleh oknum...” memiliki wacana bahwa Partai Gerindra menyayangkan oknum-oknum yang memutarbalikkan pernyataan mereka tentang dukungannya terhadap kelompok LGBT. Oknum sebagai pelaku tetap ditulis oleh Partai Gerindra, padahal apabila pelaku dihilangkan, tulisan dan pesan yang ingin disampaikan tetap akan terbaca dan dimengerti.

Kosakata “**disampaikan**” dan “**diselesaikan**” merupakan kosakata pada tweet tanggapan kepada pembaca yang memiliki wacana tentang apa yang telah disampaikan sebelumnya bahwa mereka tidak mendukung LGBT dan hanya mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tweet tersebut berisi, “Pertanyaan bodoh, pada tweet sebelumnya juga sudah disampaikan kita tidak mendukung LGBT. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah ini, orang seperti anda pendek pikirannya. Masalah tidak bisa diselesaikan dengan dukung atau tidak.” Kedua kosakata tersebut terdapat pada kalimat yang berbeda dalam 1 (satu) tweet, tetapi pelaku keduanya adalah Partai Gerindra. Mereka tidak menyebutkan pihak mereka secara jelas dan hanya menggunakan kata ganti ‘kita’.

Kosakata “**di-hack**” memiliki arti sama dengan ‘dibajak atau diambil alih dengan paksa’ (dalam hal ini konteksnya adalah komputer atau akun). Sedangkan “**di-quote**” memiliki arti ‘dikutip’ (kata-katanya atau pernyataannya). Kedua kosakata tersebut terdapat dalam satu tweet yang berisi, “Enggak di *hack*, kok. Silakan dibaca keseluruhan twitnya. Jangan hanya di *quote* bagian awalnya saja...” Wacana dari kosakata tersebut adalah yaitu untuk menginformasikan kepada pembaca bahwa pernyataan Partai Gerindra adalah dari mereka langsung, tidak ada orang

lain yang menggunakan akun mereka. partai Gerindra juga mengharapkan pembaca untuk tidak mengutip kata-kata hanya sebagian saja. Pelaku yang merupakan pembaca yang sedang ditanggapi tersebut dihilangkan karena tweet tersebut ditujukan langsung melalui balasan untuk orang tersebut.

Pada kosakata **“disimak”** dan **“dipahami”** pada tweet “... Coba disimak kembali keseluruhan twit kami dan dipahami poin-poin yang kami maksud...”, wacananya menunjukkan Partai Gerindra yang menegaskan kepada pembaca bahwa pernyataan mereka datang dari mereka dan bukan dari pihak lain. Pelaku dihilangkan dan hanya ditulis sebagai ‘mbak’ karena Partai Gerindra sudah terlalu lelah menanggapi hal-hal semacam tersebut.

Dengan kosakata **“didebat”** yang merupakan bagian dari kalimat pasif dalam tweet “Mau didebat seperti apapun dan dibawa kea rah manapun. Poin kami tidak berubah...”, wacananya adalah pembaca yang ingin mengadu debat antara Partai Gerindra dengan seseorang bernama Jhon Black (@Jhonkosmik) mengenai topik LGBT ini. Partai Gerindra menghilangkan pelaku (Jhon Black) dalam tweetnya dengan tujuan karena mereka tidak peduli mau debat dengan siapapun, pendiriannya akan tetap teguh. Tulisan pun tetap dapat dibaca dan dipahami dengan baik meskipun tanpa pelaku.

Konteks kosakata **“dianggap”** adalah pembuktian Partai Gerindra kepada pembaca bahwa mereka bukan hanya peduli dan mendukung kelompok LGBT tetapi juga kelompok minoritas lainnya yang dianggap sebagai ancaman. Terbukti dalam tweet, “Kami juga menolak dan menyuarakan melalui parlemen serta media sosial mengenai cadar dan cingkrang yang dianggap sebagai ancaman”. Pelaku dalam kalimat pasif tersebut adalah Partai Gerindra tetapi mereka tetap menuliskannya dengan kata ganti ‘kami’ dengan tujuan agar pembaca semakin jelas.

3.6 Efek Kalimat Nominalisasi: Penghilangan Pelaku

Selain menggunakan kalimat pasif, nominalisasi (mengubah kata kerja menjadi kata benda) juga dapat digunakan untuk menghilangkan pelaku tindakan. Nominalisasi adalah proses gramatikal pembentukan kata benda dari kata kerja atau kata sifat (Darma dalam Manggiasih, 2015:27). Nominalisasi dapat menghilangkan subjek karena bentuk kalimat ini bukan lagi fokus pada kegiatan tindakan, melainkan fokus pada suatu peristiwa.

Efek kalimat nominalisasi penghilangan pelaku yang diambil dari Twitter @Gerindra tidak dibedakan menjadi positif dan negatif, melainkan menjadi wacana yang berbeda-beda. Berikut

adalah perubahan yang terjadi oleh tweet-tweet Partai Gerindra apabila diubah menjadi efek kalimat nominalisasi penghilangan pelaku:

3.6.1 Wacana Hukum dan Politik

Kalimat nominalisasi dalam wacana hukum dan politik cukup banyak digunakan daripada wacana lainnya karena Partai Gerindra menggunakan kosakata nomina untuk menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan peraturan maupun saran. Sehingga kosakata kerja tidak terlalu dapat digunakan.

1. Mungkin saudara yang keseringan piknik hingga masalah hak saja tidak paham. UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 menyebutkan “TIAP-TIAP WARGA NEGARA BERHAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN”.

→ Tweet di atas sudah merupakan kalimat nominalisasi tetapi belum menghilangkan pelaku (saudara). Tetapi apabila diubah lebih detil lagi ke bentuk efek nominalisasi penghilangan pelaku menjadi **“Keseringan piknik akibatnya tidak paham masalah hak yang tertulis di UUD 1945.”**

Kalimat di atas meskipun sudah merupakan kalimat nominalisasi tetapi masih bisa diubah lagi menjadi lebih detil dan rapi dengan menghilangkan pelaku. Tujuan Partai Gerindra tidak menghilangkan pelaku adalah karena kalimat mereka cenderung bernada mencemooh pembaca tersebut.

2. Di negara ini tidak ada larangan bagi setiap warga negara untuk bekerja, jika ingin menjadi dokter, guru, polisi, bahkan hingga menjadi presiden saja diperbolehkan, karena itu adalah HAK! Paham?

→ Tweet di atas sudah merupakan kalimat nominalisasi yang menghilangkan pelaku, yaitu pihak-pihak yang melarang. Tujuan Partai Gerindra menghilangkan pelaku adalah agar fokus pada peristiwanya.

3. Buat undang-undang yang jelas terkait LGBT, galakan seminar tentang bahaya LGBT di sekolah-sekolah, aktifkan penyuluhan-penyuluhan keagamaan mengenai LGBT menyimpang dari norma agama. Jika ada kerjasama yang baik dari semua pihak, polemik LGBT ini bisa kita selesaikan.

→ Tweet di atas sudah merupakan kalimat nominalisasi yang cenderung merupakan kalimat perintah atau saran. Kalimat nominalisasi di atas menghilangkan pelaku, yaitu

pemerintah yang diharapkan melakukan hal-hal yang disebutkan di atas. Tujuan Partai Gerindra menghilangkan pelaku adalah agar fokus pada peristiwanya.

4. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

➔ Tweet di atas sudah merupakan kalimat nominalisasi karena merupakan kutipan dari Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2. Jadi tidak ada subjek maupun objek dalam kalimat di atas. Tujuannya adalah untuk menginformasikan dan menegaskan kepada pembaca bahwa hak-hak tersebut sudah ditulis dan diatur dalam Undang-undang, jadi tidak semestinya dilanggar atau diabaikan.

3.6.2 Wacana Agama

Dalam wacana agama, kalimat nominalisasi hanya ditemukan dalam 1 (satu) tweet. Hal ini karena Partai Gerindra lebih banyak menggunakan kosakata kerja daripada kosakata nomina atau perbendaan.

1. Nah, ini! Konteks yang kami bicarakan adalah kehidupan bernegara. Bukan dalam konteks kehidupan beragama. Jika dalam konteks kehidupan beragama, jelas kami tidak mendukung perilaku tersebut.

➔ Kalimat ke dua dan ketiga dalam tweet di atas sudah merupakan kalimat nominalisasi, sedangkan kalimat ke empat merupakan kalimat aktif. Pelaku juga hanya dituliskan dalam kalimat terakhir menggunakan kata ganti ‘kami’, yaitu Partai Gerindra. Tujuan efek nominalisasi penghilangan pelaku pada dua kalimat awal adalah menekankan pada peristiwanya yaitu ‘kehidupan bernegara’ dan ‘kehidupan beragama’.

3.6.3 Wacana Sosial

Dalam wacana sosial, kalimat nominalisasi juga hanya ditemukan dalam 1 (satu) tweet, itu pun tanpa terdapat pelaku atau subjek yang jelas. Hal ini disebabkan karena wacana sosial lebih banyak ditemukan dalam interaksi Partai Gerindra dengan pembaca, maka lebih banyak digunakan kosakata kerja.

1. Dengan tujuan masyarakat dapat pemahaman sejak dini bahwa perilaku LGBT adalah perilaku yang bertentangan dengan berbagai norma dan juga mempunyai dampak buruk bagi kesehatan.

→ Tweet tersebut dapat diubah ke efek kalimat nominalisasi penghilangan pelaku lebih lengkap dan detil menjadi “**Pertentangan antara perilaku LGBT dengan norma agar dipahami masyarakat.**” Kalimat tersebut menjadi tanpa pelaku, tetapi kurang dimengerti siapa pelaku yang dimaksud. Pelaku merupakan Partai Gerindra yang sudah ditulis pada tweet sebelumnya.